

ABSTRAK

PROSEDUR PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG

Oleh
WAHYU RIAN ADI SAPUTRA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat dimana anak didik pemasyarakatan melaksanakan pembinaan, mempunyai peranan penting dalam perbaikan diri anak didik pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan sistem pembinaan tersebut, diperlukan juga partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung? (2) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui informasi yang berasal dari pendapat langsung para responden. Dalam hal ini berupa informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan melakukan studi lapangan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, data sekunder yakni data yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan dan data tersier yaitu data tertulis yang bersumber dari kamus hukum, buku-buku *literature* maupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu kurangnya sarana visualisasi sebagai salah satu fasilitas penunjang pembinaan. Sehingga menyebabkan anak didik pemasyarakatan sulit memahami materi binaan yang disampaikan. Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak didik pemasyarakatan wanita agar dapat mendukung program-program pembinaan, sehingga setelah anak didik pemasyarakatan kembali ke masyarakat tidak mengulangi kembali kesalahannya.

ABSTRACT

PROCEDURES FOR DEVELOPING PRIVATE STUDENTS IN CLASS II CHILDREN SPECIFIC DEVELOPMENT INSTITUTION BANDAR LAMPUNG

By
WAHYU RIAN ADI SAPUTRA

Special Child Guidance Institutions are places where correctional students carry out coaching, have an important role in the self-improvement of correctional students as regulated in law. In implementing this guidance system, participation and support from various parties is also needed. For this reason, the problems raised in this thesis are (1) What is the procedure for guiding correctional students at the Class II Class II Special Guidance Institution in Bandar Lampung? (2) How are the efforts in overcoming the obstacles in the procedure for guiding correctional students at the Class II Special Guidance Institute for Children in Bandar Lampung?

This research uses an empirical juridical approach, namely the collection and discovery of data and information through field studies at the Class II Special Development Institute for Children in Bandar Lampung. The sources and types of data in this study are primary data obtained through information derived from the direct opinions of respondents. In this case in the form of information obtained directly through interview techniques by conducting field studies at the Bandar Lampung Class II Special Guidance Institute, secondary data, namely data sourced from the Laws and Regulations and tertiary data, namely written data sourced from legal dictionaries, books -books of literature and documents that have to do with the problem under study

The results of the research show that the procedures for guiding correctional students at the Bandar Lampung Class II Special Guidance Institution are in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. It's just that the implementation has not been carried out optimally due to several things, namely, the lack of visualization facilities as one of the supporting facilities for coaching. So that it makes it difficult for correctional students to understand the guidance material that is delivered. For this reason, it is hoped that the government will pay special attention to female prison students so that they can support coaching programs, so that after the correctional students return to the community they do not repeat their mistakes.